



PENDAPAT AKHIR
GUBERNUR SUMATERA BARAT

PADA

RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
(USUL INISIATIF DPRD)

TANGGAL 7 AGUSTUS 2019

2

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat,
Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera
Barat;

Yth. Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera
Barat;

Yth. Sdr. Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar,
Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi
Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera
Barat;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten,
Kepala OPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan
hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, kita telah dapat melaksanakan serangkaian rapat-rapat berkaitan dengan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, Allahuma Shaliala'ala Ali Muhammad.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna ini.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan

masyarakat Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan berkaitan, tidak hanya kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu perlu pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja yang terencana dan terprogram dalam pengawasan ketenagakerjaan terpadu guna terwujudnya hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan menghadapi tantangan kebutuhan tenaga kerja dimasa yang akan datang.

Dengan ditetapkannya Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi Perda, diharapkan nantinya menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan yang mengakomodir khusus daerah serta menjawab tantangan pasar khususnya dalam masyarakat Ekonomi Asean dalam menghadapi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja baik yang bekerja disektor perusahaan publik maupun pada sektor perusahaan swasta.

Pemerintah Daerah sangat mendukung Ranperda usul inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan untuk ditetapkan

menjadi Perda karena memberdayakan dan memanfaatkan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, meningkatkan kapasitas, kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Diharapkan pengaturan ketenagakerjaan ini mampu mendorong pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, sekaligus upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial.

Selanjutnya diharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait agar segera menyiapkan

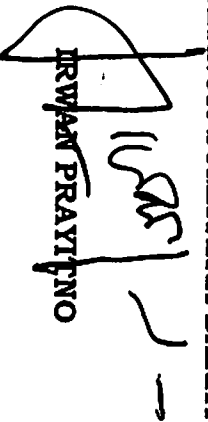
Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah yang baru saja disetujui bersama

Demikianlah hal yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga apa yang telah kita lakukan bersama akan menjadi karya yang bermanfaat dan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GOVERNOR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO